

EVALUASI PROGRAM SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS SMA KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT (Penerapan Evaluasi Model Countenance Stake)

Sumardi
SMAN I Tanah Pinoh
Melawi, Kalbar

Yetti Supriyati
Universitas Negeri
Jakarta

ABSTRACT

The purpose of this research is to evaluate the high school academic supervision program in Sintang District, West Kalimantan Province. This study uses the evaluation model of Countenance Stake. Which is focused on the preparation of academic supervision program, the implementation of the academic supervision program; And the results of the implementation of the academic supervision program. Data in this research were collected by questionnaire, interview and observation technique. The conclusions are: (1) Preparation of academic supervision program is categorized frequently (81%), found that the preparation of academic supervision program is in accordance with the Law, Government Regulation, Education Minister Regulation, Working Book of Supervisor and Working Guidance of Supervisor, (2) Academic supervision is rarely categorized (62%), found an inconsistency between intense with the standard of supervision execution. (3) the result of the academic supervision program has not fulfilled the completeness of the criteria with sufficient achievement sufficiency (65%) and (4) There is a contingency between making programming, implementation and program implementation result.

Keywords: Program Evaluation, Stake's Countenance Model, Academic Supervision

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program supervisi akademik SMA di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan model evaluasi *Countenance Stake*. Yang difokuskan pada penyusunan program supervisi akademik, pelaksanaan program supervisi akademik; dan hasil pelaksanaan program supervisi akademik. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik kuesioner, wawancara dan observasi. Kesimpulannya adalah: (1) Penyusunan program supervisi akademik dikategorikan sering (81%), ditemukan bahwa penyusunan program supervisi akademik sudah sesuai dengan Undang-Udang, Peraturan pemerintah, Peraturan menteri pendidikan, buku kerja pengawas dan pedoman kerja pengawas, (2) Pelaksanaan program supervisi akademik dikategorikan jarang (62%), ditemukan tidaksesuaian antara intens dengan standar pelaksanaan pengawasan. (3) hasil program supervisi akademik belum memenuhi kelengkapan kriteria dengan akatualitas ketercapaian cukup (65%) dan (4) Ada kontingensi antara membuat penyusunan program, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan program.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Model Stake, Supervisi Akademik

Alamat

Korespondensi

Jl P. Agung Kertasari Rt
009 Rw 005 Kel. Tanah
Pinoh,
Melawi, Kalbar 78674

e-mail:

sumardi0417@gmail.com

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pendidikan dipengaruhi oleh beberapa unsur dan komponen. Untuk melaksanakan pendidikan yang berkualitas semua unsur dan komponen harus saling melengkapi dan bersinergi. Dalam konteks ini standar pendidik dan tenaga kependidikan memegang peranan yang amat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Supervisi merupakan suatu proses mengarahkan, mendukung staf agar dapat melakukan tugasnya secara efektif (Eny Winaryati, 2014:1). Hendaknya kegiatan supervisi dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah adalah berupa pembinaan kepala sekolah dan guru agar mutu pendidikan lebih meningkat untuk mencapai prestasi belajar peserta didik yang baik. Pengawas sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik terhadap guru, harus memastikan bahwa guru memiliki empat kompetensi berikut: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian (c) kompetensi sosial (d) kompetensi profesional (Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007).

Selain itu, pengawas juga harus melakukan supervisi terhadap kepala sekolah agar kinerja mereka menjadi lebih baik. Pengawas sekolah hendaknya memastikan bahwa Kepala Sekolah berperan sebagai: educator; manager, administrator, supervisor, leader, pencipta iklim kerja, dan wirausahawan (Hendarman, 2015:18). Selain itu pengawas juga harus melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan delapan SNP pada sekolah binaannya (Buku Kerja Pengawas, 2015:12). Selanjutnya, kinerja Kepala sekolah dan guru juga harus dinilai oleh pengawas (Pedoman Kinerja Kepala Sekolah, 2012:10; Pedoman Penilaian Kinerja Guru, 2010:3).

Pengawas sekolah dalam menjalankan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya perlu melakukan tahapan-tahapan pengawasan atau supervisi yang meliputi: (1) Menyusun program supervisi; (2) Pelaksanaan program supervisi; (3) Evaluasi hasil pelaksanaan program supervisi; dan (4) program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/ atau kepala sekolah (Buku Kerja Pengawas, 2015:12).

Berdasarkan observasi awal, pengawas SMA kabupaten Sintang Kalimantan Barat memiliki beberapa permasalahan yang berkaitan dengan supervisi ke sekolah-sekolah binaan. Di beberapa tempat kepala sekolah dan guru menyatakan bahwa pengawas jarang datang untuk melakukan supervisi atau pengawasan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat pengguna jasa pendidikan. Seharusnya pengawas selalu melakukan supervisi sebagaimana yang diamanatkan dalam permenpan (pasal 7 huruf a), yakni menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program pengawasan. Atas dasar ini maka peneliti memandang perlu adanya penelitian

yang lebih mendalam agar persoalan yang terjadi dapat dicari solusinya secara akademik.

Penelitian ini membatasi diri pada evaluasi program supervisi akademik pengawas SMA dengan menggunakan evaluasi model *Countenance Stake*. Penelitian Ini dilakukan semata-mata untuk mencermati efektifitas supervisi akademik dalam membantu pendidik dan tenaga kependidikan mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran baik. Fokus penelitian ini terkait dengan program supervisi akademik di SMA Kabupaten Sintang Kalimantan Barat yang meliputi komponen perencanaan (*antecedent*), pelaksanaan (*transation/process*) dan hasil (*outcomes*) pelaksanaan supervisi akademik pengawas.

Kata evaluasi berasal dari kata *evaluation* (bahasa Inggris). Kata tersebut diserap kedalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi "evaluasi" (Arikunto dan Jabar, 2008:1). Sedangkan program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan saksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang (Tayibnapis, 2000:9).

Mengacu pada hal ini maka model evaluasi yang tepat dalam penelitian ini adalah model evaluasi *countenance stake*. Model *Countenance Stake* terdiri atas dua matriks. Matriks pertama dinamakan matriks deskripsi dan yang kedua dinamakan matriks pertimbangan (Arikunto, 2008:43).

Dalam setiap program yang dievaluasi, evaluator harus mampu mengidentifikasi tiga hal, yaitu (1) antecedent yang diartikan sebagai persiapan/konteks, (2) transaksi yang diartikan sebagai pelaksanaan, (3) *outcomes* yang diartikan sebagai hasil. Selanjutnya kedua matrik digambarkan sebagai deskripsi dan pertimbangan, menunjukkan langkah-langkah yang terjadi selama proses evaluasi. Matriks pertama, yaitu deskripsi, berkaitan atau menyangkut dua hal yang menunjukkan posisi suatu yang menjadi sasaran evaluasi, yaitu apa maksud dan tujuan yang diharapkan (*intents: what people intend*) oleh program, dan

pengamatan/akibat apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang betul-betul terjadi (*observation: what people perceive*). Selanjutnya evaluator mengikuti matriks kedua, yang menunjukkan langkah pertimbangan, yang dalam langkah tersebut mengacu pada standar yang disetujui (*standard: what people generally approve*) dan pertimbangan (*judgments: what people value the immediate program to be*) (Stafflebeam and Shlnkfeld, 1988, 218).

Ada dua cara yang dapat digunakan untuk memproses data evaluasi deskriptif pada evaluasi program ini yaitu menemukan *contingency* (keterhubungan) antara anteseden, transaksi, dan *outcome* serta *congruence* (kesesuaian) antara tujuan yang diharapkan dan kondisi yang diobservasi. Perlu diperhatikan apakah rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan pelaksanaan supervisi di lapangan terjadi penyimpangan (Astin Lukum, 2015:29).

Dengan demikian penelitian evaluasi program ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pengawas Sekolah sebagai rujukan dalam melaksanakan supervisi akademik sehingga mampu meningkatkan kinerja dan minat pengawas dalam melakukan supervisi akademik di SMA di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

2. Metode Penelitian

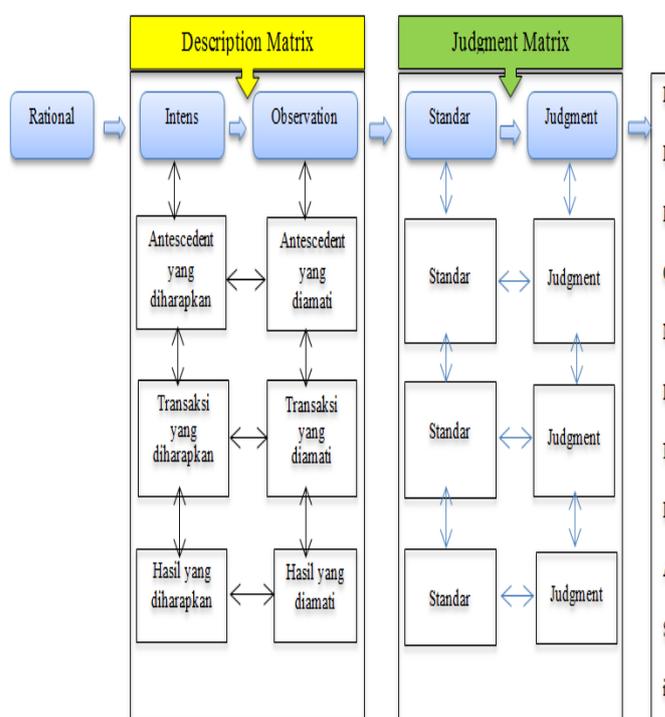
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan model evaluasi yang digunakan adalah Coutenance Stake. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan realitas apa adanya terkait dengan komponen *antecedents* (masukan), *transaction* (proses) dan *outcomes* (hasil)

Berdasarkan pada desain evaluasi di atas maka setiap komponennya dapat dijelaskan seperti berikut: (1) **Antecedents** (persiapan/pendahuluan) atau masa sebelum program supervisi akademik pengawas SMA dilaksanakan. Deskripsi meliputi *intents* dan *observation*, berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan efek yang diinginkan. Dalam konteks penelitian ini yang merupakan bagian dari *intents* meliputi (a) Undang-undang; (b) Peraturan Pemerintah; (c) Permendinas; (d) Permenpan RB;

pada program supervisi akademik pengawas SMA Kabupaten Sintang.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluasi dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dimaksudkan agar dapat memperoleh pemahaman dan penafsiran yang relatif mendalam tentang makna dari fenomena yang ada di lapangan. Penelitian ini juga dilakukan dengan teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan kuesioner/angket.

Desain Penelitian evaluasi program supervisi akademik dengan model stake adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Desain Evaluasi Model Stake (Astin Lukum, 2015:30)

(e) Permendikbud. *Observation* data adalah hal yang berhubungan dengan kenyataan dan peristiwa. Hal yang terjadi pada fase ini terkait dengan kondisi nyata. Obyek dari observasi pada penelitian ini adalah: (a) menyusun program pengawasan tahunan; (b) identitas program pengawasan tahunan; (c) pendahuluan program pengawasan tahunan; (d) identifikasi dan analisis hasil supervisi program pengawasan tahunan; (e) matriks program pengawasan tahunan; (f) lampiran program pengawasan tahunan; (g)

matriks program pembinaan guru; (h) matriks pembinaan kepala sekolah; (i) matriks program pemantauan pelaksanaan delapan SNP; (j) matriks program penilaian kinerja guru; (k) matriks penilaian kinerja kepala sekolah; (l) matriks penilaian kinerja kepala sekolah; (m) menyusun RPA, RPBK dan RPM; (n) instrumen kegiatan pengawasan. *Judgments* yang terdiri dari; (a) standar (kriteria yang digunakan sebagai pembanding); dan *judgment* (proses membandingkan intens, observasi dengan standar, (2) Fase **transaction** (masa ketika program diimplementasikan). *Description* meliputi *intents*; tindakan apa yang dilakukan dan *observation* meliputi perilaku pengawas, kepala sekolah dan guru yang dilaksanakan terkait dengan: (a) melaksanakan pembinaan guru; (b) melaksanakan pembinaan kepala sekolah; (c) memantau pelaksanaan delapan SNP; (d) melaksanakan penilaian kinerja guru; dan (e) melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah.

Judgment terdiri atas standar, yakni kriteria yang digunakan sebagai dasar pembanding dan *judgment*, proses membandingkan intent, observasi dengan standar, (3) Fase **outcomes** (periode atau masa setelah program supervisi akademik dilaksanakan di mana data telah

dikumpulkan). Deskripsi meliputi intens seperti hasil yang diinginkan atau diprediksi dan *observation* merupakan data yang dikumpulkan di akhir program berupa hasil pembinaan guru dan kepala sekolah, pemantauan delapan SNP dan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. *Judgment*, yang terdiri dari standar atau kriteria yang digunakan sebagai dasar pertimbangan, dan *judgment* proses membandingkan intens, observasi dengan standar.

Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik menyebarkan angket/kuesioner, wawancara dan observasi kepada pengawas, kepala sekolah dan guru. Studi observasi diperoleh dalam bentuk dokumen laporan pengawasan, program pengawasan dan foto.

Data penilaian dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut.

$$\text{Nilai Perolehan} = \frac{\text{Skor mentah}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100$$

Nilai perhitungan persentase (%) kemudian dikonversikan dalam bentuk kualitatif untuk menentukan aktualitas ketercapaian. Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan mengenai kinerja seorang pengawas sekolah sebagai hasil penilaian kinerja menggunakan transformasi rentang skor ke nilai berikut:

Gambar 2 Transformasi dari Rentang Skor ke Nilai

Interval(%)	Nilai (Huruf)	Kategori	Klasifikasi Prestasi Kinerja
85-100	A	Selalu	Amat Baik
69-84	B	Sering	Baik
53-68	C	Jarang	Cukup
37-52	D	Jarang Sekali	Sedang
21-36	E	Tidak Pernah	Kurang

(Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas sekolah, 2014:19)

Keterangan: Komponen penyusunan dan pelaksanaan dalam penelitian ini diukur berdasar intensitas pelaksanaan tiap-tiap komponen yang dievaluasi dengan menggunakan kategori selalu, sering, jarang, jarang sekali dan tidak pernah. Sedangkan untuk mengukur hasil pelaksanaan program supervisi (*outcomes*) diukur dengan

menggunakan klasifikasi prestasi kerja (amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil Evaluasi

Tesis yang berjudul “Evaluasi Program Supervisi Akademik Pengawas SMA Kabupaten Sintang Kalimantan Barat” ini secara khusus mengevaluasi program supervisi akademik yang terkait dengan komponen penyusunan/persiapan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan dari supervisi yang dilakukan oleh pengawas SMA di Kabupaten Sintang.

Penyusunan Program Supervisi Akademik (Antecedent)

Komponen yang dibahas terkait dengan persiapan/penyusunan meliputi: (a) menyusun program pengawasan tahunan; (b) indentitas program pengawasan tahunan; (c) pendahuluan

program pengawasan tahunan; (d) identifikasi dan analisis hasil supervisi program pengawasan tahunan; (e) matriks program pengawasan tahunan; (f) lampiran program pengawasan tahunan; (g) matriks program pembinaan guru; (h) matriks pembinaan kepala sekolah; (i) matriks program pemantauan pelaksanaan delapan SNP; (j) matriks program penilaian kinerja guru; (k) matriks penilaian kinerja kepala sekolah; (l) matriks penilaian kinerja kepala sekolah; (m) menyusun RPA, RPBK dan RPM; (n) instrumen kegiatan pengawasan.

Di bawah ini disajikan rekapitulasi hasil komponen penyusunan program supervisi pengawas dalam bentuk tabel:

Gambar 3 Tabel Rekapitasi Penyusunan Program Pengawasan Tahunan

No	Komponen yang dievaluasi	Rata-rata	Persentase Per Aspek
	Penyusunan Program Pengawasan		
1	Menyusun program Supervisi tahunan	83	81
2	Indentitas Program Supervisi Tahunan	80	
3	Pendahuluan Program Pengawasan Tahunan	81	
4	Identifikasi dan Analisis Hasil Supervisi Tahunan	81	
5	Matriks Program Pengawasan Tahunan	83	
6	Lampiran Program Pengawasan Tahunan	85	
7	Matriks Program Pembinaan Guru	84	
8	Matriks Pembinaan Kepala Sekolah	82	
9	Matriks Program Pemantauan Pelaksanaan Delapan SNP	83	
10	Matriks Program Penilaian Kinerja Guru	78	
11	Matriks Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	72	
12	Menyusun RPA, RPBK dan RPM	84	
13	Instrumen Kegiatan Pengawasan	82	

Analisis data ketiga belas pada penyusunan program supervisi yang dinilai tersebut di atas secara keseluruhan memperoleh persentase sebesar 81% termasuk kategori sering. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyusunan program sudah dilaksanakan dengan baik, namun tidak semua pengawas sudah menyusun program pengawasan tahunan sebelum mereka melakukan supervisi, karena berbagai macam alasan, antara lain karena kurangnya anggaran ATK dan karena pengawas menggunakan file tahun yang sudah lewat.

Pelaksanaan Program Supervisi Akademik (transaction)

Setelah menyusun kelengkapan supervisi, seorang pengawas harus melaksanakan apa yang sudah disusun dan direncanakannya. Untuk ini pengawas tentu melibatkan banyak orang sebagai sasaran pengawasannya, di antaranya adalah kepala sekolah dan guru. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan responden sebanyak 5 (lima) orang Pengawas, 20 (dua puluh) orang kepala sekolah dan 200 (dua ratus) orang guru. Pada tahap

pelaksanaannya peneliti akan menguraikan satu persatu komponen yang dilaksanakan oleh pengawas terhadap kepala sekolah dan guru. Adapun yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengawas meliputi: (a) melaksanakan pembinaan guru; (b) melaksanakan pembinaan kepala sekolah; (c) memantau pelaksanaan

delapan SNP; (d) melaksanakan penilaian kinerja guru; dan (e) melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah. Tahap pelaksanaan program supervise akademik secara keseluruhan untuk semua aspek yang dinilai disajikan dalam bentuk tabel berikut di bawah ini:

Gambar 4 Tabel Rekapitulasi Pelaksanaan Program Pengawasan

No	Komponen yang dievaluasi	Rata-rata	Persentase Per Aspek
	Pelaksanaan Program Pengawasan		
1	Melaksanakan pembinaan guru	62	62
2	Melaksanakan pembinaan kepala sekolah	62	
3	Memantau pelaksanaan 8 SNP	63	
4	Melaksanakan penilaian kinerja guru	62	
5	Melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah	63	

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengawas masih jarang melaksanakan program pengawasannya. Ini tampak pada rata-rata persentase keseluruhan aspek ini sebesar 62% termasuk kategori jarang. Kendala yang dihadapi pengawas adalah tidak adanya anggaran untuk kegiatan pengawas, infrastruktur jalan dan jembatan yang buruk dan kondisi geografis kabupaten Sintang yang luas.

Hasil Pelaksanaan Program Supervisi (outcomes)

Pelaksanaan program supervisi hendaknya dapat dilakukan dengan konsisten dan baik. Pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru hendaknya dapat bersinergi dalam mensukseskan pelaksanaan program supervisi di sekolah. Pelaksanaan program yang diharapkan ditandai dengan terselenggaranya proses pendidikan dengan baik. Lebih dari itu, kepala sekolah dan guru diharapkan lebih dalam

melaksanakan tugas setelah dibimbing dan dibina pengawas. Sebagai akibatnya kepala sekolah dan guru melaksanakan tugasnya dengan baik, peserta didikan pun diharapkan memiliki prestasi yang gemilang. Pada tahap *outcomes* ini diharapkan efek dari kinerja pengawas tidak hanya berdampak secara jangka pendek, melainkan dampak yang terjadi dalam waktu yang panjang. Hasil pelaksanaan program pengawasan pada tahap ini meliputi lima aspek, yakni: hasil pembinaan guru; hasil pembinaan kepala sekolah; hasil pemantauan 8 SNP; hasil pelaksanaan penilaian kinerja guru; dan hasil pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah. Untuk ini peneliti melakukan penelitian terhadap beberapa responden, yaitu 5 (lima) orang pengawas, 20 orang kepala sekolah dan 200 orang guru di Kabupaten Sintang. Adapun rata-rata persentase evaluasi pelaksanaan program pengawasan/ supervisi untuk semua komponen disajikan dalam bentuk table di bawah ini:

Gambar 5 Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Program Supervisi

No	Komponen yang dievaluasi	Rata-rata	Persentase Per Aspek
	Hasil Program Pengawasan		
1	Hasil pembinaan guru	64	65
2	Hasil pembinaan kepala sekolah	64	
3	Hasil pemantauan 8 SNP	62	
4	Hasil pelaksanaan penilaian kinerja guru	69	
5	Hasil pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah	68	

Analisis terhadap data hasil program supervisi diperoleh rata-rata 65% (cukup). Menunjukkan bahwa dampak dari kinerja pengawas belum memuaskan atau masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya pelaksanaan supervise sehingga berakibat kurangnya dampak yang bisa dirasakan oleh guru dan kepala sekolah yang diawasi.

b. Pembahasan

Pengawas sebagaimana yang diamanatkan dalam permendiknas mesti berperan aktif dalam menyusun, mengawasi, memantau, mengolah dan melaporkan hasil pelaksanaan delapan SNP (Permendiknas No 6 tahun 2011: Pasal 3). Senada dengan itu, permenpan RB juga mengamanatkan kepada pengawas untuk selalu menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan supervisi (Permenpan RB No 21 tahun 2010 *Pasal 12 huruf b*). Hasil penelitian untuk setiap tahapan Evaluasi Program Supervisi Akademik Pengawas SMA Kabupaten Sintang dapat disajikan pada matriks *Countenance Stake* pada tabel yang meliputi intens, observasi, standar dan *judgment*. Masing-masing 3 (tiga) komponen program yang dikelompokkan dalam tabel menurut *antecedent*, *transaction*, dan *outcomes*. Pengelompokan ini dilakukan tidak hanya untuk menentukan apakah terdapat perbedaan tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, akan tetapi juga untuk

membandingkan dengan standar, guna menilai manfaat suatu program (Tayibnapi, 2008:22). Suatu program dianggap efektif manakala semua komponen dalam dilaksanakan secara baik dan seimbang. Selanjutnya hal itu dianalisis melalui *congruence* dan *contingency*.

I. Congruence

1) Tahap Antecedent

Komponen yang dievaluasi pada *antecedent* ini adalah penyusunan program supervisi pengawas. Sebagaimana diamanatkan dalam lampiran permenpan (Permenpan No. 14 tahun 2016) bahwa seorang pengawas sekolah harus menyusun program supervisi akademiknya terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar apa yang akan dilakukan pengawas di lapangan terarah dan rinci. Karena terarah dan rinci pengawas dapat mencapai tujuan seperti yang dihendaki. Tujuannya supaya kualitas pendidikan semakin meningkat dan kinerja guru dan kepala sekolah dari hari ke hari semakin baik. Untuk ini kerja sama yang baik di antara sesama pemangku kepentingan juga sangat diharap. Suksesnya pelaksanaan pengawasan harus di dukung oleh lingkungan pendidikan yang baik, kondusif. Artinya guru dan kepala sekolah dapat dijadikan mitra yang baik dalam melaksanakan tugas pengawas. Berikut ini disajikan *countenance matrix* komponen *antecedent*:

Gambar 5 Tabel *Countenance Matrix* Komponen Antecedent

Deskripsi Matrix		Judgment Matrix	
Intens (Goals)	Observasi (Effects)	Standar	Judgment
Pengawas menyusun program supervisi/pengawasan sesuai dengan: - UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional -UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen - PP No. 74 tahun 2008 tentang guru - Permendiknas no. 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/ madrasah - Permenpan RB No. 21 tahun 2010 jabatan fungsional pengawas sekolah - Permendiknas No. 39 tahun 2009 tentang beban Kerja Guru dan Pengawas sekolah - Permendikbud No. 143 tahun 2014 tentang juknis jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. - buku kerja pengawas Sekolah, - Pedoman kinerja pengawas Sekolah. - Permendiknas dan Kepala BKN No. 6 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya	Aktualisasi pencapaian penyusunan program pengawasan sebesar 81% termasuk dalam kategori sering. Artinya mayoritas pengawas sudah sering melakukan penyusunan program pengawasan sesuai dengan tuntutan UU, PP dan peraturan pemerintah.	Komponen yang dinilai terkait dengan penyusunan program pengawasan adalah: 1. Menyusun program Supervisi tahunan 2. Identitas Program Supervisi Tahunan 3. Pendahuluan Program Pengawasan Tahunan 4. Identifikasi dan Analisis Hasil Supervisi Tahunan 5. Matriks Program Pengawasan Tahunan 6. Lampiran Program Pengawasan Tahunan 7. Matriks Program Pembinaan Guru 8. Matriks Pembinaan Kepala Sekolah 9. Matriks Program Pemantauan Pelaksanaan Delapan SNP 10. Matriks Program Penilaian Kinerja Guru 11. Matriks Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 12. Menyusun RPA, RPBK dan RPM 13. Instrumen Kegiatan Pengawasan	Sebagian besar pengawas sudah menyusun program pengawasan dengan baik seperti yang diamanatkan oleh buku kerja pengawas Sekolah, pedoman kinerja pengawas Sekolah, UU, PP dan Peraturan pemerintah.UU, PP dan permendiknas, dan permendikbud

Berdasarkan tabel di atas penyusunan program pengawasan/ supervisi yang dilakukan oleh pengawas termasuk dalam kategori sering, yaitu 81%. Kesesuaian antara intens dan observasi pada matriks deskripsi hampir menunjukkan adanya kesetaraan yang maksimal. Hal ini dapat ditunjukkan oleh hasil per aspek yang diperoleh. Di mana masing-masing aspek berada pada kategori sering. Beberapa faktor yang menyebabkan sebagian kecil dari pengawas jarang melakukan penyusunan program supervisi pada komponen di atas antara lain

karena pengawas melakukan penyusunan secara kolektif, tidak adanya anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK), sulit mengumpulkan data tahun sebelumnya secara lengkap dan akurat.

Untuk itu pengawas memerlukan dukungan dari semua pihak guna merealisasikan programnya, terutama pihak dinas pendidikan provinsi dalam hal pendanaan ATK; kepala sekolah dan guru membantu dalam hal menyumbangkan data yang lengkap dan akurat agar pengawas bisa bekerja dengan baik terkait dengan penyusunan program tahun berikutnya.

2. Tahap Transaction

Setelah menyusun program supervisinya, pengawas harus mengimplementasikan programnya di lapangan. Seharusnya apa yang

diprogramkan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun hasil komponen pelaksanaan program supervisi pengawas yang dimaksud dapat kita sajikan dalam tabel komponen *transaction* berikut di bawah ini:

Gambar 6 Tabel *Countenance Matrix* Komponen *Transaction*

Deskripsi Matrix		Judgment Matrix	
Intens (Goals)	Observasi (Effects)	Standar	Judgment
<p>Komponen yang dinilai terkait dengan pelaksanaan program pengawasan adalah:</p> <p>a. Melaksanakan pembinaan guru;</p> <p>b. Melaksanakan pembinaan kepala sekolah;</p> <p>c. Memantau pelaksanaan 8 SNP; d. Melaksanakan penilaian kinerja guru;</p> <p>e. Melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah</p> <p>2. Komponen yang dinilai terkait dengan evaluasi hasil pelaksanaan program: mengevaluasi hasil pembinaan guru; mengevaluasi hasil pembinaan kepala sekolah; mengevaluasi hasil pemantauan 8 SNP; mengevaluasi hasil pelaksanaan penilaian kinerja guru; dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah</p>	<p>Aktualisasi pencapaian pelaksanaan program pengawasan menurut versi pengawas, kepala sekolah, dan guru rata-rata persentase sebesar 62%. Ini termasuk dalam kategori jarang. Dengan demikian masih banyak pengawas yang jarang melaksanakan dan mengevaluasi program pengawasan sesuai dengan tuntutan UU, PP dan peraturan pemerintah.</p>	<p>Pengawas melaksanakan dan mengevaluasi program supervisi/pengawasan sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional - UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen - PP No. 74 tahun 2008 tentang guru - Permendiknas no. 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/ madarasah - Permenpan RB No. 21 tahun 2010 jabatan fungsional pengawas sekolah - Permendiknas No. 39 tahun 2009 tentang beban Kerja Guru dan Pengawas sekolah - Permendikbud No. 143 tahun 2014 tentang juknis jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. - buku kerja pengawas Sekolah, - Pedoman kinerja pengawas Sekolah. Permendiknas dan Kepala BKN No. 6 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya 	<p>Pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan program supervisi belum sesuai dengan tuntutan buku kerja pengawas Sekolah, pedoman kinerja pengawas Sekolah, UU, PP, Permendiknas, permendikpan dan permendikbud.</p>

Tabel di atas menjelaskan bahwa ketercapaian pelaksanaan program supervisi pengawas masih belum sesuai dengan harapan. Pengawas belum maksimal melaksanakan tugasnya. Berdasarkan analisis versi pengawas, kepala sekolah dan guru terhadap semua aspek adalah: melaksanakan pembinaan guru (62%); melaksanakan pembinaan kepala sekolah (62%); memantau pelaksanaan 8 SNP (63%); melaksanakan penilaian kinerja guru (62%); melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah (63%). Rata-rata persentase komponen pelaksanaan program memperlihatkan bahwa pengawas jarang melaksanakan programnya (62%).

Hasil ini menunjukkan ketidaksesuaian antara harapan (*intens*) dan kenyataan (*observasi*). Terkait dengan pembinaan guru, Asetine, Faryniarz dan Rigazio-Digilio dalam buku yang berjudul *Supervision for Learning* menawarkan tiga aspek kunci yang harus dilakukan oleh guru dan pengawas, yakni: (1) Pengawas dan guru harus memahami perbedaan jenis data dan bagaimana masing-masing berkontribusi untuk memberi pertimbangan mendasar terhadap program pelaksanaan supervisi dan evaluasi; (2) Pengawas dan guru harus memahami bahwa pelaksanaan supervisi dan evaluasi semacam tindakan penelitian yang memungkinkan guru dan pengawas mengintervensi, memonitor keberhasilan

pelaksanaan pelajaran dan mengatur kegiatan yang diikuti; dan (3) Pengawas dan guru harus memiliki komitmen bersama-sama yang tinggi untuk kepentingan pengajaran siswa. (Aseltine, Faryniarz and Rigazio-Digilio, 2006:38).

Beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program supervisi lemah atau tidak bisa dilaksanakan dengan baik antara lain adalah:

a. Kondisi geografis Kabupaten Sintang

Infrastruktur jalan dan jembatan yang buruk dan berlumpur membuat para pengawas jarang datang ke sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kota. Wilayah yang luas, jarak yang jauh serta rasio jumlah pengawas dengan sekolah dan guru yang tidak ideal merupakan kendala yang tidak bisa dipandang sebelah mata (Winaryati, 2014:21)

b. Anggaran dana dari pemerintah (dinas pendidikan)

Kurangnya anggaran yang dialokasi untuk kegiatan pengawas adalah juga penyebab jarangya pengawas datang ke sekolah di daerah terpencil guna melakukan supervisi. Medan yang berat, jarak yang jauh memerlukan support dana yang memadai, sehingga pelaksanaan pengawasan bisa dilaksanakan dengan baik dan

lancar. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang, pendanaan pendidikan seharusnya menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena memiliki anggaran maka dalam peraturan daerah pun harus mengalokasikan dana yang cukup untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan. Dana yang dialokasikan harus memenuhi prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. (UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 46-47).

c. Data yang tidak lengkap dan akurat sehingga pengawas sulit melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap programnya.

3. Tahap Outcomes

Komponen yang dievaluasi pada *outcome* ini adalah hasil pelaksanaan program supervisi akademik. Tahap ini tidak hanya melihat hasil berupa angka-angka, namun lebih dari itu mau melihat dampak jangka panjang terkait dengan apa yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah terhadap kepala sekolah dan guru. Adapun analisis matriks komponen *outcomes* yang memuat komponen di atas adalah sebagai berikut:

Gambar 7 Countenance Matrix Komponen Outcomes

Deskripsi Matrix		Judgment Matrix	
Intens (Goals)	Observasi (Effects)	Standar	Judgment
Dampak yang diharapkan Berhasilnya: pembinaan guru, pembinaan kepala sekolah, pemantauan 8 SNP, pelaksanaan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah.	Aktualisasi pencapaian hasil pelaksanaan program supervisi secara keseluruhan sebesar 65% termasuk kategori cukup.	- Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Muda/Madya/Utama - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah	Dampak hasil pelaksanaan pengawas sebesar 65% termasuk dalam kategori cukup. Semua aspek pelaksanaan supervisi belum berdampak baik. Supervisi harus ditingkatkan.

Dari tabel di atas tampak bahwa hasil pelaksanaan program supervisi belum bisa dilaksanakan dengan baik. Ini dibuktikan dengan hasil yang diperoleh dari semua aspek dengan

rata-rata persentase sebesar 65% (cukup). Berkaitan dengan pembinaan guru permendiknas RI mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kompetensi yang memadai berkaitan dengan pedagogic, kepribadian, social dan professional. Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru (Permendiknas No.16 Tahun 2007).

Kepala sekolah selaku pimpinan untuk suatu sekolah pun perlu memiliki kompetensi yang memadai dalam hal kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervisi, kepribadian, dan social (Permendiknas No.13 tahun 2007). Penilaian kinerja guru pun harus membawa dampak positif terhadap guru. Tujuan penilaian kinerja guru adalah untuk mengukur ketercapaian sejauh mana pengembangan kompetensi guru ataupun untuk memotivasi guru dalam melaksanakan tugasnya. Begitu juga dengan penilaian kinerja kepala sekolah harus bermanfaat secara maksimal agar kepala sekolah dapat mengetahui nilai kinerjanya dan menggunakan hasil kinerja dengan baik (Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, 2012:13-14).

2. Contingency

Tahap *Contingency* menurut model Stake, menganalisis keterhubungan antara *antecedent* dengan *transaction*, *transaction* dengan *outcome* dan *antecedent*, *transaction* dan *outcomes*, baik pada intens dan *observation*. Analisis dari setiap komponen yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan. Adapun hasil untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

- Tahap penyusunan program supervisi pengawas (*antecedent*) dengan rata-rata sebesar 81% termasuk kategori sering/baik,
- Tahap Pelaksanaan program supervise (*transaction*) dengan rata-rata sebesar 62% termasuk kategori jarang/ cukup.
- Hasil pelaksanaan program (*outcomes*) dengan rata-rata 65% termasuk kategori jarang/cukup.

Rata-rata hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa antara penyusunan program (*antecedent*), pelaksanaan (*transaction*) dan hasil pelaksanaan program supervisi (*outcomes*) tidak setara atau tidak sesuai antara semua komponen. Tahap penyusunan memperlihatkan bahwa pengawas sering

melakukan penyusunan program. Namun dalam pelaksanaannya sulit diimplementasikan. Sulitnya melaksanakan program membuat hasil kinerja pengawas tidak maksimal. Idealnya di antara ketiga tahap *antecedent*, *transaction* dan *outcomes* program supervisi pengawasan harus dilaksanakan secara seimbang. Dengan kata lain, jika pengawas menyusun program, seharusnya pengawas bisa melaksanakannya dengan baik sehingga menimbulkan dampak yang baik pula. Selanjutnya setelah dilaksanakan hendaknya program tersebut ditindaklanjuti dengan baik untuk menyusun strategi baru guna memperbaiki aspek yang belum terlaksana dengan baik.

Jadi berdasarkan data tersebut di atas menggambarkan bahwa terdapat *contingency* antara penyusunan, pelaksanaan dan hasil program supervisi akademik di Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Atau dengan kata lain hubungan antara penyusunan/persiapan (*antecedent*) dengan pelaksanaan (*transaction*) dan hasil (*outcomes*) belum setara. Dari hasil penelitian ini penyusunan lebih baik dari pelaksanaan dan hasil. Kemudian hubungan antara *transaction* dan *outcomes* belum memperlihatkan dampak yang signifikan. Begitu juga hubungan antara intens, observasi dan standar menunjukkan apa yang diharapkan sulit untuk diaktualisasikan. Karena tahap *transaction* belum dilaksanakan dengan baik maka menyebabkan hasil tahap *outcomes* belum maksimal. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Prihanto yang menemukan bahwa tahap pelaksanaan dan hasil program pengawas masih belum dilaksanakan dengan baik (Prihanto, 2016:113).

Faktor penyebab mengapa semua tahap belum bisa dilakukan secara maksimal karena kelemahan pribadi pengawas, medan yang berat dan sokongan dana yang minim, terutama untuk penyusunan dan pelaksanaan. Jika hal seperti ini terus terjadi maka tingkat keterlaksanaan program pengawasan akan terganggu.

4. Kesimpulan Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan program supervisi akademik pengawas sekolah Kabupaten Sintang berada pada kategori sering (81%), Antara intens dan observasi pada matriks deskripsi ditemukan hampir seimbang antara penyusunan dengan tuntutan UU, PP dan Permendiknas/Permendikbud. Gambaran ini menunjukkan bahwa tahap penyusunan program sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Pelaksanaan program supervisi akademik pengawas sekolah Kabupaten Sintang termasuk dalam kategori jarang (62%). Ditemukan belum ada kesesuaian antara pelaksanaan dengan tuntutan UU, PP dan Permendiknas/Permendikbud. Ini memperlihatkan bahwa pengawas jarang melaksanakan pengawasan.
3. Hasil pelaksanaan dari supervisi akademik (65%) termasuk kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa hasil supervisi pengawas SMA Kabupaten Sintang belum menunjukkan dampak yang baik dan maksimal.
4. Terdapat *contingency* antara penyusunan, hasil pelaksanaan program supervisi pengawas. Adanya komponen yang termasuk kategori jarang menyebabkan harapan, tuntutan dan kenyataan tidak dapat disetarakan dengan maksimal.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian atas program supervisi akademik di SMA Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, maka saran dan rekomendasi yang dapat kami usulkan adalah sebagai berikut:

1. Pengawas sekolah seharusnya menyusun program supervisinya tahunan dan semesteran secara lengkap agar apa yang akan dilaksanakan pada tahun/semester berjalan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Kepala sekolah harus bersinergi dengan pengawas, guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Dalam konteks ini, Kepala sekolah harus mendukung dan memfasilitasi pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
2. Guru

3. Guru hendaknya proaktif dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada pengawas terkait dengan apa yang dilakukan di sekolah agar pengawas mengetahui apa yang menjadi kesulitan di lapangan.

4. Dinas Pendidikan Provinsi hendaknya memfasilitasi pengawas dengan menyediakan dana, sarana dan prasarana (ATK) yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawas.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi dan Cipi Safruddin Abdul Jabar. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Aseltine, James M., Judith O. Faryniarz and Anthony J. Rigazio-Digilio, *Supervision for Learning*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD), 2006.
- Buku Kerja Pengawas Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
- Hendarman, *Revolusi Kinerja Kepala sekolah*. Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media, 2015
- Lukum, Astin. *Evaluasi Program Pembelajaran IPA menggunakan Model Countenance Stake*. Gorontalo: Univesitas Negeri Gorontalo, 2015.
- Pedoman Kinerja Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2010.
- Pedoman Kinerja Kepala Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.
- Pedoman Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.
- Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah*
- Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*
- Prihanto, Agus. *Evaluasi Program pengawasan Sekolah Menengah Kejuruan Kota Balikpapan Kalimantan Timur*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2016.
- Stufflebeam, Anthony J. Shinkfield., *Sytematic Evaluation*. Boston: Kluwer-Nijhoff, 1988.

Sumardi
Yetti Supriyati

*Evaluasi Program Supervisi Akademik Pengawas SMA
Kabupaten Sintang Kalimantan Barat*

Tayibnapis, Farida Yusuf. *Evaluasi Program*. Jakarta:
Rineka Cipta, 2000.

*UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional*